

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Manusia senantiasa dikelilingi oleh berbagai masalah kebijakan (Policy Issue) dalam kehidupan sehari – hari. Agar kehidupan masyarakat tetap berjalan teratur dan memiliki tujuan, maka dibutuhkan peraturan atau kebijakan. Menurut (Isabela, 2022) Kebijakan berasal dari kata policy yang merupakan prinsip atau cara bertindak untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Desrinelti (2021) menyatakan bahwa Konsep kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai peraturan, program, dan proyek undangundang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah.

Serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik dibuat dengan niat untuk memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat, tentunya bervariasi dan intensitasnya karena kebijakan publik tidak dapat dihasilkan dari semua masalah (Prabawati I. , 2020).

Salomo (2022) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah aturan yang menjamin eksistensi masyarakat kita. Sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk memahami kebijakan publik karena kebijakan publik menentukan nasib

masyarakat. Kebijakan publik yang benar adalah kebijakan yang bersifat transparan, melayani masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Pada hakikatnya, Kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum. Dengan memahami hakikat kebijakan publik maka dapat membantu kita dalam urusan kebijakan pemerintah. Tujuan utama dari kebijakan publik adalah mengatasi masalah publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi masalah yang ada seperti kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan kemacetan lalu lintas. Selain itu, kebijakan publik dapat membantu mendukung pembangunan dan tujuan nasional. Kebijakan publik yang sesuai dapat melindungi hak – hak manusia. Dengan demikian, kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah dapat membangun keidupan masyarakat dengan lebih terorganisir untuk meraih tujuan.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik adalah serangkaian fase tahap atau fase untuk membuat kebijakan publik. Kebijakan publik yang diterima oleh masyarakat adalah tujuan publik yang dibuat dengan campur tangan masyarakat. Selain itu, transparansi terhadap pembuatan kebijakan publik perlu untuk memberikan kepuasan pada masyarakat. Menurut William Dunn dalam Fatmarianti (2023) proses kebijakan publik adalah serangkaian langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk membuat,

melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Proses kebijakan publik dapat dikembangkan sebagai berikut :

- a. Proses pengkajian kebijakan, Menyediakan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi ini terdiri dari protokol, aturan, dan sistem yang digunakan untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan.
- b. Proses pembuatan kebijakan, Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu.
- c. Proses komunikasi kebijakan, Hasil dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, membuat dan menilai secara kritis kebijakan.

Perumusan proses kebijakan publik mencakup pembuatan agenda pemerintahan, pembuatan usulan kebijakan publik, pengesahan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik, dan penilaian Fase analisis harus menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan. Rancangan kebijakan dan berbagai alternatif harus dianalisis untuk menentukan kebijakan yang paling efektif dan dapat diterapkan dengan baik (Kusuma, 2020).

Dengan demikian, proses kebijakan publik perlu diperhatikan secara seksama agar dapat mendapatkan respon positif dari masyarakat. Respon yang diberikan masyarakat menjadi aspek utama agar kebijakan tersebut dapat dijalankan. Proses

pembuatan kebijakan yang transparansi dan mengutamakan pendapat atau masukan masyarakat tersebut adalah komponen kebijakan yang dapat di jalankan.

2.1.2 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Maryani & Nainggolan (2017), pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan atau fasilitas, tetapi lebih kepada membangkitkan inisiatif masyarakat agar aktif dalam memecahkan masalahnya sendiri. Artinya, masyarakat tidak menjadi objek pembangunan semata, melainkan subjek aktif yang memiliki andil besar dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya. Inisiatif ini mencakup segala bentuk kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bertujuan memperbaiki kondisi hidup secara mandiri dan berkelanjutan.

Syaifuddin (2017) menekankan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses transformasi kemampuan. Proses ini bisa melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, maupun pengalaman langsung, sehingga masyarakat memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara strategis dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya. Dalam konteks nelayan kecil, ini berarti mereka didorong untuk tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga memiliki pengetahuan dalam manajemen keuangan, pemasaran hasil tangkapan, serta diversifikasi usaha perikanan.

Urhuhe Dena Siburian (2018) pemberdayaan berbasis potensi lokal. Artinya, masyarakat perlu dikenalkan dan difasilitasi untuk menggali serta memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial, maupun budaya yang mereka miliki. Kemandirian ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga sosial dan kelembagaan.

Misalnya, melalui pembentukan koperasi nelayan atau kelompok usaha bersama (KUB), masyarakat dapat lebih mudah mengakses pasar, modal, dan teknologi, sehingga taraf hidup mereka meningkat tanpa bergantung terus-menerus pada bantuan eksternal.

2. Pengertian peningkatan kesejahteraan

Menurut Todaro dan Smith (2017), kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalani kehidupan yang bermakna. Peningkatan kesejahteraan mencakup akses yang adil terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, makanan bergizi, serta kesempatan untuk memilih pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang sesuai. Dalam konteks nelayan kecil, hal ini bisa berupa peningkatan kualitas gizi keluarga nelayan, kepemilikan rumah yang layak, serta akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.

UNDP dalam Hamid (2018) menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari pendekatan pembangunan manusia. Kesejahteraan sejati adalah ketika seseorang memiliki pilihan hidup yang luas misalnya, memiliki pilihan pekerjaan, pilihan pendidikan, dan kemampuan untuk memutuskan masa depan hidupnya. Hal ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya investasi pada kapasitas dasar manusia, seperti pendidikan, pelatihan vokasional, dan kesehatan. Oleh karena itu, program peningkatan kesejahteraan harus diarahkan untuk memperkuat ketiga aspek ini agar masyarakat tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan psikologis.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Proses perumusan kebijakan publik selalu memperhatikan beberapa karakteristik penting agar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan. Berbagai peraturan atau kebijakan dibuat oleh pimpinan atau eksekutif dan ditindak lanjuti oleh pelaku birokrasi dan stakeholders. Sehingga jika terjadi kegagalan dalam implementasinya merupakan tugas dan tanggungjawab jajaran birokrasi (Muadi, 2019).

Menurut Andriani (2023) implementasi kebijakan mencakup tahap penting di mana visi dan tujuan kebijakan diterapkan dalam tindakan lapangan. Secara sederhana, penerapan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi program dan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat dikenal sebagai implementasi kebijakan publik. Proses ini melibatkan interaksi sosial dan politik yang kompleks selain masalah teknis. Untuk memahami implementasi kebijakan publik, para pembuat kebijakan, pelaksana, dan akademisi harus tahu siapa yang mendapatkan manfaat kebijakan, kapan, dan bagaimana.

4. Faktor Keberhasilan Implementasi

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendasari. Fitriani (2022) menjelaskan dalam jurnalnya sebagai berikut :

- a. Kualitas kebijakan Kebijakan yang dirancang dengan baik, jelas, dan koheren lebih mudah diimplementasikan.

- b. Komitmen dan kepemimpinan Dukungan dan komitmen dari pemimpin politik dan birokrasi sangat penting untuk memastikan kelancaran implementasi.
- c. Kapasitas organisasi Organisasi pelaksana kebijakan harus memiliki sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.
- d. Komunikasi dan koordinasi Komunikasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dan koordinasi yang solid antar instansi terkait sangat penting untuk menghindari miskomunikasi dan duplikasi effort.
- e. Sumber daya Ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti anggaran, personel, dan infrastruktur, sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan.
- f. Konteks politik dan social Faktor politik, seperti stabilitas pemerintahan dan dukungan masyarakat, serta faktor sosial, seperti budaya dan nilai-nilai masyarakat, dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam pendekatan Edwards III pada jurnal Governance karya Delpiero et al. (2021), terdapat empat faktor untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu :

- a. Komunikasi

Suatu kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran untuk mengurangi distorsi implementasi. Jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau sama sekali tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka dapat diperkirakan akan terjadi penolakan dari kelompok sasaran.

b. Sumber Daya

Sekalipun isi suatu kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, implementasinya tidak akan efektif jika pelaksana kebijakan tidak mempunyai sumber daya untuk melaksanakannya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu keterampilan implementasi, atau sumber daya keuangan. Sumber daya merupakan elemen kunci untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan tinggal di atas kertas dan menjadi dokumen.

c. Disposisi

Disposisi adalah kepribadian dan sifat yang dimiliki oleh pelaksana yaitu komitmen, integritas, dan karakter demokratis. Apabila para pelaksana mempunyai sikap yang baik, maka mereka akan mampu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pengambil kebijakan. Proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif apabila para pelaksana mempunyai sikap dan cara pandang yang berbeda dengan pengambil kebijakan.

d. Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural yang penting dalam suatu organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). SOP merupakan pedoman bagi seluruh pelaksana. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung menyebabkan 14 lemahnya pengawasan dan birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini akan menimbulkan kekakuan dalam kegiatan organisasi.

2.1.3 Efektivitas Program

1. Pengertian Efektivitas

Pengertian Efektivitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Ravianto (2014:11) Efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Menurut Gibson et.al (2013:46) pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif. Kriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanya ditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi juga ditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan, hal tersebut untuk meminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yang berbeda-beda

2. Aspek-Aspek Efektivitas

Syamsuddin (2018) menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- a. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.

- b. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif
- c. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.

Efektivitas program, dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Budiani (2007) yang di rangkum oleh Jibril (2017) menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut ini

- a. Ketepatan Sasaran yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- b. Sosialisasi Program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.
- a) Tujuan Program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b) Pemantauan Program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program

3. Indikator Efektivitas

Menurut Sutrisno dalam Wulandari (2018:16) ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan sebuah program atau suatu kegiatan diantaranya:

a. Pemahaman Program

Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini dimaksudkan ketika program dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya. Pihak yang perlu memahami program ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut.

b. Ketepatan Sasaran

Sasaran dibahas pada indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah dilakukan sejak awal.

c. Ketepatan Waktu

Indikator selanjutnya adalah ketepatan waktu, waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kehidupan. Ketepatan waktu dalam hal ini suatu program dikatakan efektif apabila pelaksanaan program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.

d. Tercapainya Tujuan

Pada indikator ini menilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai. Tercapainya tujuan pada program pemberdayaan masyarakat dilihat dari sejauh mana beberapa tujuan yang sudah menjadi aturan sejak awal program ini dapat tercapai. Semakin banyak memberikan manfaat dapat dikatakan efektif apabila tujuan telah tercapai.

e. Perubahan Nyata

Mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditetapkan sejak awal dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana.

2.1.4 Kesejahteraan Nelayan Kecil

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Sunarti, 2006).

Kesejahteraan nelayan kecil merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi maritim di Indonesia. Nelayan kecil adalah individu atau kelompok nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap sederhana, memiliki skala usaha kecil, serta bergantung langsung pada sumber daya perairan untuk kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak

hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rasa aman dalam menjalankan pekerjaan.

Menurut Saptana dan Susilowati (2020), kesejahteraan nelayan ditentukan oleh kemampuan mereka dalam mengakses sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan, memiliki sarana produksi yang memadai, serta mendapatkan harga jual ikan yang menguntungkan. Namun, dalam kenyataannya, nelayan kecil seringkali menghadapi berbagai permasalahan struktural, seperti keterbatasan teknologi, akses modal yang sulit, fluktuasi harga hasil tangkap, hingga intervensi tengkulak yang mempersempit ruang keuntungan nelayan.

Rahardjo (2021) menambahkan bahwa kesejahteraan nelayan kecil dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan dan literasi keuangan, yang menyebabkan mereka kurang mampu dalam mengelola pendapatan serta mengambil keputusan ekonomi yang rasional. Hal ini diperburuk oleh minimnya perlindungan sosial dan asuransi kerja di sektor kelautan, yang menjadikan nelayan sebagai kelompok rentan terhadap risiko bencana dan kecelakaan kerja.

Upaya peningkatan kesejahteraan nelayan kecil telah dilakukan pemerintah melalui program-program seperti bantuan alat tangkap, subsidi bahan bakar, pemberdayaan koperasi nelayan, pelatihan diversifikasi usaha, serta integrasi dengan sistem pasar digital. Akan tetapi, program-program tersebut sering kali belum tepat sasaran, disebabkan lemahnya validasi data nelayan dan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan kebijakan.

Pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan dibutuhkan untuk mengangkat kesejahteraan nelayan kecil. Menurut pendekatan Sustainable

Livelihoods Framework (SLF), kesejahteraan nelayan akan tercapai jika lima aset utama, yakni aset manusia (keterampilan dan pendidikan), aset alam (sumber daya perairan), aset finansial (pendapatan dan akses modal), aset fisik (sarana dan prasarana), serta aset sosial (jaringan dan kelembagaan) dapat diperkuat secara bersamaan.

Selain itu, pengembangan ekonomi biru (blue economy) menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil. Dengan prinsip pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan inklusif, nelayan kecil dapat diintegrasikan dalam rantai nilai perikanan yang lebih modern, transparan, dan adil. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pemetaan daerah penangkapan ikan (ZPPI), sistem pemasaran daring, dan literasi digital, juga menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi usaha dan pendapatan mereka.

Dengan demikian, kesejahteraan nelayan kecil hanya dapat dicapai melalui kombinasi antara intervensi kebijakan yang tepat, penguatan kapasitas komunitas nelayan, serta pelibatan aktif nelayan dalam proses pengambilan keputusan. Meningkatkan kesejahteraan mereka berarti menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia di masa depan.

1. Aspek-Aspek Penting dalam Kesejahteraan Nelayan Kecil

- a. **Ekonomi:** Pendapatan yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, pengelolaan hasil tangkap yang efisien, dan akses pasar.
- b. **Sosial:** Pendidikan anak nelayan, status sosial di komunitas pesisir, dan keterlibatan dalam kelembagaan lokal.

- c. Lingkungan: Akses terhadap wilayah tangkap yang lestari, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, dan kesadaran konservasi.
- d. Kesehatan dan Perumahan: Akses terhadap layanan kesehatan dan tempat tinggal yang layak.
- e. Keamanan dan Perlindungan: Adanya perlindungan sosial seperti asuransi nelayan dan jaminan hari tua.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan landasan penting dalam sebuah studi ilmiah karena memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan searah dengan topik yang dikaji. Selain itu, kajian pustaka dari berbagai penelitian ini membantu peneliti memahami perkembangan, temuan, serta kekosongan (gap) penelitian yang dapat dijadikan pijakan untuk mengembangkan studi lebih lanjut.

Dalam konteks peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, sejumlah penelitian telah dilakukan oleh berbagai peneliti dalam kurun waktu setelah tahun 2020. Penelitian-penelitian ini secara umum membahas berbagai pendekatan program pemberdayaan nelayan, efektivitas kebijakan pemerintah, peran kelembagaan, hingga integrasi teknologi digital dalam mendukung aktivitas nelayan kecil.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain: keterlibatan aktif nelayan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan dari lembaga lokal maupun pemerintah, serta keberlanjutan dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Selain itu,

pemberdayaan yang bersifat partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat nelayan terbukti lebih mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Dengan mengkaji penelitian terdahulu, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmiah, mengisi kekosongan penelitian, serta memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, khususnya di Kota Batam.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Hidayat, R. (2020)	Evaluasi Program Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kabupaten Pesisir Selatan	Kualitatif	Program pemberdayaan meningkatkan akses permodalan, namun implementasi masih kurang tepat sasaran.
2.	Sukmawati Abdullah, Awaluddin Hamzah, Dwi Yudha Prabowo (2023)	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)	Kualitatif Deskriptif	Program PEMP cukup efektif dalam pendampingan dan pembentukan lembaga, namun perlu peningkatan dalam distribusi bantuan dan pelatihan.

		di Kecamatan Abeli		
3.	Dompak & Riyanda (2018)	Analisis Efektivitas Kebijakan dan Program Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam terhadap Peningkatan Persentase Pelaksanaan Amdal	Kualitatif	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa karena kesadaran yang masih kurang serta masih ada investor yang bertindak nakal, sehingga dalam pelaksanaannya masih belum efektif di daerah pantai. Beberapa komponen berkontribusi pada peningkatan persentase AMDAL : meningkatnya kebutuhan investor dalam kontribusi perusahaan serta sosialisasi yang lebih baik, adanya hukum akan kesadaran publik
4.	Veronica H. V. Syamsudin, Femmy	Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam	Kualitatif deskriptif	Program KUR efektif dalam aspek ketepatan sasaran, waktu, jumlah dana,

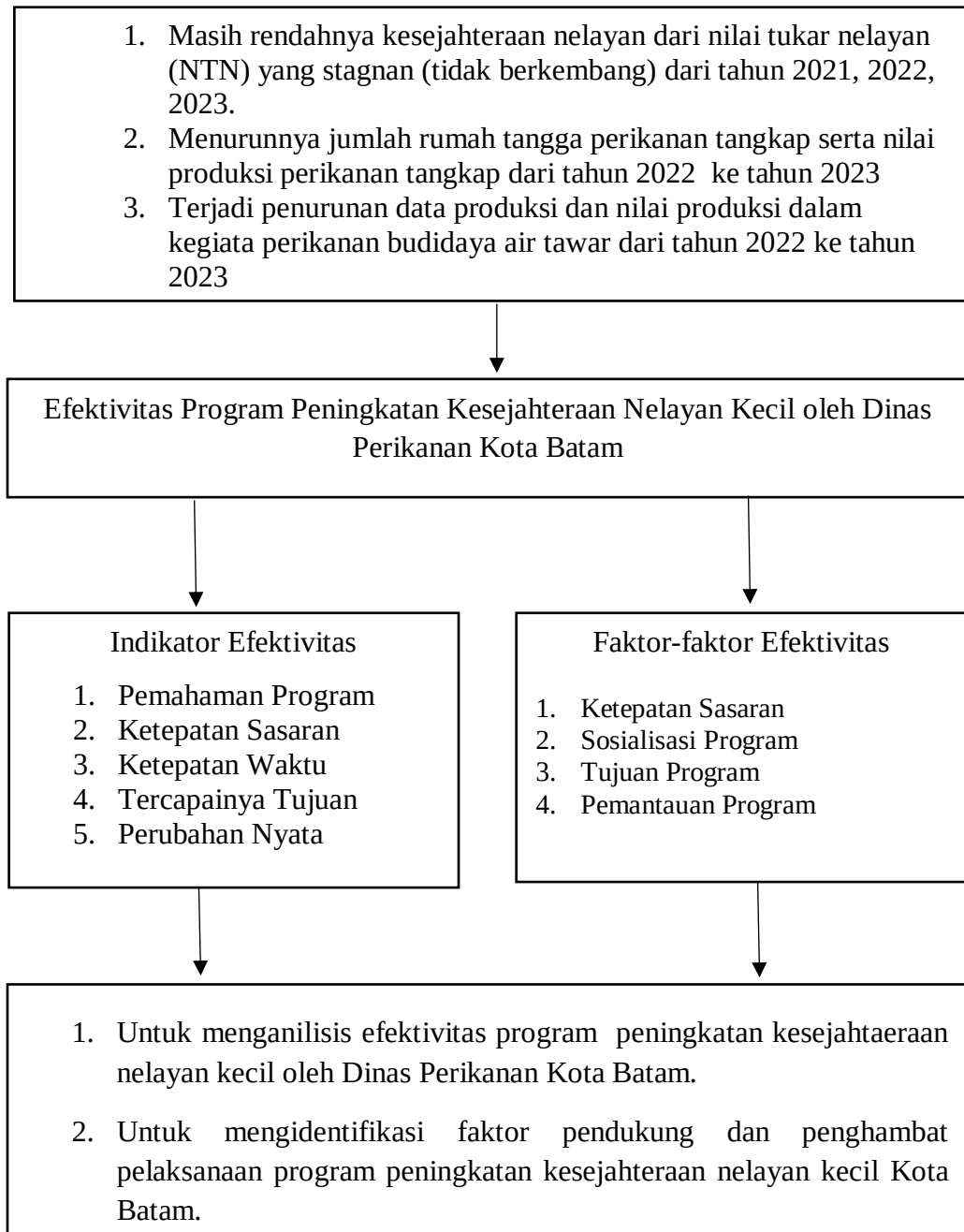
	Tulusan & Very Londa (2022)	Pemberdayaan Masyarakat Nelayan: Studi di Desa Borgo, Minahasa		beban kredit, dan prosedur. Namun, masih terdapat nelayan yang belum terjangkau dan perlu optimalisasi cakupan.
5.	Gilbert Siby (2024)	Efektivitas Program Pemerintah dalam Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Madidir, Bitung	Kualitatif	Program efektif dari sisi sosialisasi dan pemantauan, namun terdapat kendala dalam distribusi kartu nelayan dan akses informasi, meskipun secara umum output program mencapai tujuan sosial ekonomi.
6.	Gun Gun Gumilar & Hasbi Nuryasin (2020)	Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Karawang	Kualitatif	Program cukup efektif dalam meningkatkan semangat kerja dan adaptasi nelayan, namun indikator pencapaian tujuan dan integrasi program perlu perbaikan karena kurang tepat sasaran

				dan minim informasi publik.
7.	Ice Irawati et al. (2020)	Efektivitas Pemberdayaan K3 Nelayan di Pulau Buluh, Batam	Kualitatif	Penyuluhan berbasis partisipatif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran K3 nelayan signifikan ($p < 0,05$). Disarankan adanya pendampingan lanjutan untuk mempertahankan efek positif.
8.	Andriani, D. & Fadli, M. (2021)	Evaluasi Program Bina Usaha Nelayan di Kabupaten Barru	Kualitatif Deskriptif	Program bina usaha nelayan berhasil mendorong kemandirian ekonomi, namun dukungan permodalan dan pelatihan wirausaha masih terbatas
9.	Zulfikar, R. & Hartono, B. (2022)	Implementasi Program Kelautan dan Perikanan di Desa Bontolebang, Sulawesi Selatan	Kualitatif	Program berhasil meningkatkan produksi hasil laut, namun kelembagaan lokal dan monitoring

				lapangan masih belum optimal
--	--	--	--	---------------------------------

Sumber: Data Sekunder, 2025

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran